DPMPTSP
KABUPATEN BATANG

Rencana Kerja

RANKHIR TAHUN 2025

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Kabupaten Batang 51212
Telp : (0285) 4493081 | Instagram : @ptsp.batang
Email : dpmptsp@batangkab.go.id ; ptsp@batangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Batang ini merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/egiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Batang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Batang. Program dan Kegiatan pada Renja 2025 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Batang serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencaana Kerja (Renja 2025) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG
Sekretaris,

MARGO SANTOSA, S.E, M.M
NIP. 19701017 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 7
1.2. Landasan Hukum 8
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP 13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP …..... 23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP..... 26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025..... 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Batang 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB V PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 ……..... 14
2. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 20
3. Pencapaian Kinerja Komulatif Pelayanan OPD 25
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Batang 28
5. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 33
6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 33
7. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang …….. 41

LAMPIRAN :

1. Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Darah (RKPD) Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

2. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Batang, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Disamping itu, hasil perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD sejak penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RABPD sampai dengan penetapan APBD. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan maka akan disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan operasional program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.
8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 .
11) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
12) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022;

14) Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);

15) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten BatangTahun 2023 – 2026

16) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten BatangTahun 2023 – 2026

17) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi / misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi / serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Rencana Kerja suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

- **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024**

  Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2024 sebesar Rp 5.913.820.423,- yang terdiri dari Belanja Opersional yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.6768.464.423,- dan belanja Modal sebesar Rp 235.356.000,- yang terbagi dalam 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

  Dari seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat capaian fisik 100%, sedangkan untuk realisasi Total Belanja sebesar Rp 5.013.933.403,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,53%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 346.898.062,- atau 6,47 %. Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 2.749.869.668,- (95,76 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.264.063.735,- (90,95%), Jika Realisasi Pendapatan Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (91%) dari Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- maka terjadi peningkatan dari Target PAD tahun 2023 sebesar Rp. 713.092.888,- (32,41%).

Secara keseluruhan Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode rekening	U r a i a n	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
4	PENDAPATAN	6.500.000.000	3.871.200.000	51,03
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.500.000.000	3.871.200.320	2.628.799.680
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.500.000.000	3.871.200.320	48.97
5	BELANJA DAERAH	5.461.420.423	2.415.588.248	100
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.461.420.423	2.415.588.248	2.811.624.668
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.973.227.241	1.009.570.885	24,02
	Belanja Barang dan Jasa	2.488.193.182	1.406.017.363	26,21
5 . 2 . 1	BELANJA MODAL	52.400.000	-	-
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.400.000	-	-
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT	5.513.820.423	2.415.588.248	51,23

Secara keseluruhan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	Capaian (%)
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.718.000**	**3.217.000**	**100**
	1. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.718.000	3.217.000	**100**
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.952.157.241**	**1.009.570.885**	**95,76**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.926.837.241	997.180.885	**95,69**
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.320.000	12.390.000	**100**
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	25.000.000	-	**0**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	-	**0**
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**293.976.000**	**170.741.624**	**99,78**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.958.200	3.524.500	**99,99**

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.000.000	24.995.100	100
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.207.000	19.167.000	99,28
	4. Penyedaian Bahan Logistik Kantor	75.815.000	38.235.000	99,95
	5. Penyedaian Barang Cetakan dan Penggandaan	44.999.800	26.978.800	99,51
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.996.000	2.331.000	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	55.510.224	99,95
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**454.945.580**	**233.400.000**	**99,04**
-	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.298.000	67.840.000	99,23
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**722.822.422**	**383.078.684**	**98,32**
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.500.000	99,62
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	352.529.222	199.876.151	97,09
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.293.200	178.702.533	99,45
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.606.600**	**197.625.820**	**100**
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.925.000	165.125.820	100
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.181.600	0	-
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000	24.150.000	100,00
VIII	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**87.200.000**	**3.056.900**	**92,98**
	1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	87.200.000	3.056.900	92,98
IX	**Program Promosi Penanaman Modal**	**49.000.000**	**30.724.250**	

	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	49.000.000	30.724.250	
X	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**540.718.760**	**241.778.080**	**87,55**
	1. Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	381.690.110	189.602.130	87,28
	2. Penyediaan dan pengelolaan layanan knsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	90.758.250	28.323.350	84,75
	3. Pemantauan, analisi, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko	68.270.400	23.852.600	99,29
XI	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**430.547.000**	**154.225.000**	**23,54**
	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanay	65.688.000	12.150.000	35,86
	2. Bimbingan Teknis kepada Palaku Usaha	269.357.000	113.430.000	16,91
	3.Pengawasan Penanaman Modal	95.502.000	28.645.000	
XII	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**89.746.400**	**34.771.800**	**97,11**
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	89.7456.400	34.771.800	97,11
	JUMLAH	**5.513.820.423**	**2.415.588.248**	**51,23**

- **Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2023**

  Sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, maka telah disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026, yang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

  1. Sasaran “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang. “

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, Fasilitasi kerja sama antara Usaha besar dan Kecil serta Temu usaha/ temu investor.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2024	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/3)	(7)= (5/4)
1	Jumlah Investasi di Kab. Batang	2,5 Trilyun	6,175 Trilyun	3,505 Trilyun	100	100 (Naik)
2	Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	20 Unit	40	35	100	15 (Naik1)
Rata-rata Capaian Sasaran					100	

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran Meningkatnya minat untuk berinventasi di Kabupaten Batang sebesar 100, % atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori sangat amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut terutama didukung oleh capaian indikator Jumlah Perusahaan yang berinvestasi mencapai 100% dari targetnya. Sedangkan capaian indikator Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang sudah mencapai target, ditargetkan sebanyak 20 perusahaan namun realisasinya ada 35 perusahaan atau mencapai 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini mengalami penurunan di karenakan masih berjalan di triwulan III. Keberhasilan dalam memfasilitasi kerja sama tersebut berdampak pada peningkatan Kepeminatan Kemitraan Usaha, sedangkan keberhasilan penyelenggaraan pameran investasi sesuai dengan target yang ditetapkan, berdampak pada peningkatan nilai investasi, dimana pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp. 6,,175 Trilyun. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi

tahun 2022 yang mencapai Rp. 6,301.059 trilyun,- maka terdapat penurunan realisasi investasi sebesar Rp. 126 Milyard atau 2,3 %.

2. Sasaran “meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha tersebut didukung oleh program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi penanaman modal, kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2024	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan /penurunan
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/3)	(7)=(5/4)
1	Jumlah realisasi nilai investasi	2,5 Trilyun	6,175	3 Trilyun	100	50
2	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	5.200 ijin	28.324 ijin	9.226 ijin	100	100
	Rata-rata Capaian Sararan				100	

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha sebesar 100% atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja, dari indikator kenaikan jumlah realisasi nilai investasi mengalami kenaikan 100% jika dibandingkan target RPJMD, sedangkan untuk indikator jumlah ijin usaha yang diterbitkan mengalami kenaikan 100 %.

- **Pelaksanaan Pencapaian Tahun Anggaran 2024**

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp 2.738.782.044,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG GUNA PENCAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Meningkatnya Minat untuk berinventasi di Kabupaten Batang	49.000.000	30.724.250	75
2	Meningkatnya Nilai Realisasi investasi dan meningkatnya ijin usaha	87.200.000	3.056.900	100
	Total	**192.296.400**	**191.703.750**	**99,69**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari dalam 2 program dengan 9 kegiatan yang telah dicapai oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebesar 99,69%.

Sedangkan untuk program dan kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di Sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 2.984.450.547,- atau 97,76 %.

Secara keseluruhan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1 (TC – 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2024

Kabupaten Batang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Reali sasi Renja SKPD Tahun 2024	Tk Realisasi (%)		Realisas Capaian Program &Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.18	**Penanaman Modal**									
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**									
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***									

2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD dan dokumen perencanaan SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pendukung pelaksaan tugas	Tersusunnya dokumen LAKIP, Renja, LKPJ, LPPD,LKD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	Tersusunnya dokumen LAKIP, LKjIP, LPPD, LKD , Renja,	100%	100
2.18.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***									
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak-hak ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	Terbayarnyar gaji dan tunjanganASN selama 12 bl	100%	100
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biaya pendukung pelaksanaan tugas	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	Biaya pendukung pelaksanaan tugas selama 1 th tercukupi	100%	100
2.18.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***									
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan SDM	SDM Memadai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Pelatihan SDM	100%	100
2.18.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***									
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	terwujudnya penerangan bangunan kantor	terlaksananya penggantian komponen listrik	Pengadaan alat-alat listrik 1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	terlaksananya penggantian komponen listrik 1 paket	100%	100
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupi sarana dan prasarana kantor	Tercukupi sarana dan prasarana kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Pengadaan alat-alat rumah tangga	1 paket	1 paket	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.06.04	Penyedaian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kegiatan rapat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Belanja mamin untuk keperluan rapat	-	-	100	Terbayarnya belanja mamin untuk keperluan rapat	100%	100
2.18.01.2.06.05	Penyedaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan dokumen kantor	Cetak blanko perijinan, map, amplop, brosur serta fotocopy	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksananya pencetakan blanko ijin dan penggandaan dokumen kantor 1 paket	100%	100
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya sarana informasi	tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, tabloid	12 Bulan	12 Bulan	100	tersedianya bahan bacaan selama 12 bl	100%	100
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengganya Rakor dan konsultasi keluar daerah	terbayarnya biaya perjalanan dinas selama 12 bulan	Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	terbayarnya biaya perjalanan dinas selama 12 bulan	100%	100
2.18.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***									
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	6 Paket	6 Paket	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	100%	100
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana peralatan gedung kantor	Belanja pengadaan peralatan sarpras gedung kantor	8 Paket	8 Paket	100	Terselenggaranya pengadaan peralatan sarpras gedung kantor	100%	100
2.18.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***									

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan adm perkantoran selama 5 th	Tersedianya perangko dan meterai keperluan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan	100%	100
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya kegiatan dan komunikasi kedinasan	Terlaksananya penerangan kantor dan komunikasi kedinasan	Terbayarnya jasa rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	Terbayarnya jasa rekening telepon, air dan listrik 12 bl	100%	100
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor selama 1 th	100%	100
2.18.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***									
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya mobilitas kegiatan kedinasan	terlaksananya servic kendaraan dan biaya STNK	23 Unit	23 Unit	100	-	-	-
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengecatan perbaikan gedung kantor DMPTSP Kab. Batang,	1 Paket	1 paket	100	Terlaksanya pemeliharaan gedng kantor 1 paket	100%	100
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor DMPTSP Kab. Batang,	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket	100%	100
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**									

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.02.2.01	*Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*									
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Belanja laporan percapatan di bidang PM				Terselesaikannya laporan percepatan di bidang PM		
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**									
2.18.03.1.01	**Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**									
2.18.03.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kebijakan Daerah							
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**									
2.18.04.2.01	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*									
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinanan	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinanan	Belanja kelengkapan pelayanan terpadu perijinan	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinan selama 1 th	100%	100
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor berkat pentingnya perijinan	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Meningkatnya jumlah investor	12 Bulan	12 Bulan	100	Peningkatan jumlah investor	100%	100

		dan pemenuhan komitmennya								
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor berkat pentingnya perijinan dan pemenuhan komitmennya	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Terpenuhinya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100	Terpenuhinya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	100%	100
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**									
2.18.05.2.01	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*									
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian PM	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM	Tersusunnya pengawasan dan pengendalian PM	50 perusahaan	5 perusahaan	100	Tersedianya buku pengawasan dan pengendalian PM 100 perusahaan	100%	100
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan temu usaha/temu investor	Terlaksanya temu usaha/temu investor	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batang	5 Investor	5 Investor	100	Terselenggaranya temu usaha	100%	100
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**									
2.18.06.2.01	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*									

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya sistem informasi penanaman modal	Terlaksananya percepatan dibidang penanaman modal	Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	12 Bulan	12 Bulan	100	Terselesaikannya pengelolaan data dan sistem informasi PM	100%	100

Untuk Tahun 2024 karena dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka klasifikasi dan Nomenklatur program/kegiatan harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Keguatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyesuaikan Permendagri seperti Tabel berikut :

Tabel : 2

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Inikator kinerja Program/kegiatan	lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	sumber dana
2	**Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.**					
2.18.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah**					
2-18.01.2-01	**Perencaanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
2-18.01.2-01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				6.000.000,00	
2-18.01.2-01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 jenis	6.000.000,00	DAU
2-18.01.2-02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2 649 835 547,00	

2-18.01.2-02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	2.608.975.547,00	DAU
2-18.01.2-02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dukungan pelaksanaan tugas		12 bulan	40.860.000,00	DAU
2.18.01.2.06	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***					
2.18.01.2.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkanya SDM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Kegiatan	51.523.500	
2-18.01.2-06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**271.027.280,00**	
2-18.01.2-06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	87 buah	6.958.200,00	DAU
2-18.01.2-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	56 item	50.000.000	DAU
2-18.01.2-06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 item	20.207.000	DAU
2-18.01.2-06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7 item	79.815.000	DAU
2-18.01.2-06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 jenis	44.999.800	DAU
2-18.01.2-06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	3.996.000	DAU
2-18.01.2-06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45 kali	65.051.280	DAU
2-18.01.2-07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				454.945.580	
2.12 . 2.12.01.01 . 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya bangunan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 paket	225.000.000	DAU
2-18.01.2-07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor		1 paket	229.945.580	DAU
2-18.01.2-08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**716.570.014**	
2-18.01.2-08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	159 buah	5.000.000	DAU
2-18.01.2-08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	300.336.814	DAU
2-18.01.2-08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	411.233.200	DAU
2-18.01.2-09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				238.606.600	
2-18.01.2-09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	21 kendaraan	177.925.000	DAU
2.18 . 2.12.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	28.181.600	DAU

2.18 . 2.12.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 jenis	32.500.000	DAU
2.18 . 2.12.01.01 . 15	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				75.000.000	
2.18. 2.12.01.01 . 15.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 draf	75.000.000	DAU
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terhitungnya jumlah promosi di Kabupaten Batang			60.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		49.000.000	
2.18 . 2.12.01.01 . 18	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**540.718.760**	
2.18 . 2.12.01.01 . 18.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan terpadi perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2850 izin	381.690.110	DAU
2.18. 2.12.01.01 . 18.02	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis resiko	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8 kegiatan	90.758.250	DAU
2.18 . 2.12.01.01 . 18.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	68.270.400	DAU
2.18. 2.12.01.01 . 19	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**430.547.000**	
2.18 . 2.12.01.01 . 19.01	Penyelesaian Permasalahan danHambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	Jumlah pelaksanaan pemantauan Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	84 kali	65.688.000	DAK
2.18 . 2.12.01.01 . 19.03	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelakku usaha yang telah di bimtek	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	300 orang	269.357.000	DAK
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pengawasan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	150 perusahaan	95.502.000	DAK
2.18 . 2.12.01.01 . 20	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**89.746.400**	
2.18. 2.12.01.01 . 20.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem Informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	89.746.400	DAU
	Total Anggaran TA. 2024				**5.513.820.423**	

Hambatan dan Strategi pemecahan masalah

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal antara lain :

- Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses perizinan
- Perubahan regulasi yang sangat cepat sehingga tentang dalam penerapannya masih belum maksimal.
- Masih banyak wilayah yang belum memiliki sehingga integrasi dengan system perizinan belum komprehensif.
- Masih dijumpainya ketidaksinkronan regulasi sektoral dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Kecenderungan nilai tukar rupiah yang tidak stabil.
- Perekonomian global yang belum menentu
- Kurangnya event promosi investasi di Kabupaten Batang
- NSPK Kementerian teknis yang ada masih belum bisa untuk pedoman dalam acuan penerapan prosedur yang mudah diikuti
- System OSS RBA belum terintegrasi secara penuh dengan system perizinan
- Database pada system aplikasi OSS RBA belum terklasifikasi dengan jelas
- Kompetensi SDM penanaman modal yang perlu ditingkatkan
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan data pelaporan perkembangan penanaman modal yang masih perlu ditingkatkan dalam Laporan LKPM
- Masih dijumpainya pelanggaran regulasi penanaman modal

Beberapa strategi pemecahan masalah antara lain :

- Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal
- Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal
- Meningkatkan efisiensi pelayanan akan dilakukan penyempurnaan organisasi penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan IT untuk keperluan pengembangan tracking system on line service dan jaringan internet

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif investasi berupa pemberian kemudahan persyaratan dan penerapan penerbitan izin secara pararel
- Menerapkan investasi berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang dituangkan dalam izin investasi, PBG dan izin lingkungan serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan
- Menyelenggarakan pameran potensi investasi dan produk serta penyediaan informasi realisasi dan peluang investasi
- Melakukan koordinasi guna pemecahan atas masalah-masalah pelayanan izin yang menghadapi kendala
- Melakukan peningkatan terobosan dalam pelayanan melalui pelaksanaan inovasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah institusi yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

Indikator Kinerja urusan penanaman modal adalah :

1) Nilai SAKIP di Kab. Batang
2) Jumlah Realisasi Nilai Investasi

Analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 pada masing-masing indikator secara komulatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang tahun 2024 sebanyak 65 perusahaan, jika dibanding tahun sebelumnya sebanyak 33 perusahaan, berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 32 perusahaan, sedangkan target per tahun 40 perusahaan.
2. Jumlah Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 sebesar Rp. 6.175 Trilyun jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 6,301 Trilyun berarti ada penurunan sebesar Rp. 125 Milyard atau 0,9 %.

3. Jumlah ijin yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 19.468 ijin, jika dibanding realisasi tahun 2024 sebanyak 7.463 ijin berarti ada penurunan sebanyak 12.468 ijin atau 31 %, dari target tercapai per tahun dikarenakan perhitungan ditahun 2024 masih di realisasi bulan Juli 2024.

Secara keseluruhan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut pada tabel 2.

Tabel 3

PENCAPAIAN KINERJA KOMULATIF PELAYANAN SKPD

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Lokal/lain	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
					Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026			Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th.2025	
1	SPM	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
2	IKK	-	Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	-	20	20	20	20			20	33	65		20	
		-	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	-	1.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.236	958		2.000	
		-	Jumlah Realisasi Nilai Investasi	-	1,5 T	2 T	2,5 T	3 T			6,175 T	3,4 T	0		264 M	
		-	Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan	-	5100	5200	5300	5400			19,	2.192	19.451		2.850	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN. Hal ini berdampak pula pada investasi di Kabupaten Batang dikarenakan beberapa keunggulan berinvestasi di Kabupaten Batang yaitu :
   - Posisi yang strategis
   - Potensi ekonomi
   - Ketersediaan lahan dan potensi pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang
   - Ketersediaan daya dukung produksi
   - Potensi tenaga kerja dan pasar yang berlimpah
   - Kemudahan proses perizinan
   - Jaminan keamanan berinvestasi

B. Gejolak perekonomian global yang tak kunjung selesai menyebabkan munculnya beberapa masalah diantaranya :
   - Pemutusan hubungan kerja secara missal
   - Ketidakpastian perkembangan harga komoditas
   - Meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak operasional

C. Berdasarkan Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pelaksanaan PTSP di daerah harus segera dilaksanakan, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
   - Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli
   - Terbatasnya sarana dan prasarana
   - Deregulasi sektoral belum maksimal sehingga pelaksanaan regulasi di daerah masih belum optimal
   - Penerapan system Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan izin masih menemui banyak kendala.

D. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang rata-rata pertahun diatas 5 % dengan distribusi kontribusi sector industry sebesar 34,08 % dan perdagangan dan jasa 12,70 %. Dari gambaraan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Kabupaten Batang masih menginginkan pertumbuhan ekonomi 5%, maka sector industry diperlukan penambahan lahan baru. Ketersediaan lahan tidak terlepas dari kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam Rencaana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039 sesuai dengan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2019

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah. Oleh karena itu Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyesuaikan permendagri seperti table berikut :

Tabel 4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batang

No.	Rancangan Awal RKPD					Akhir e plainning Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	**Lokasi**	**Inikator kinerja Program/ kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program / kegiatan**	**lokasi**	**Inikator kinerja Program/kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.					**Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				**5.939.473.171**	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				**5.939.473.171**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah**				**4.172.267.941**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah**				**4.172.267.941**	
1	**Perencaanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Perencaanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.649.835.547	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2.649.835.547	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanama	Jumlah Gaji ASN DPMPTSP	12 bulan	2.608.975.547	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman	Jumlah Gaji ASN DPMPTSP	12 bulan	2.608.975.547	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n Modal dan PTSP	Tersedianya dukungan pelaksanaan tugas	12 bulan	40.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Modal dan PTSP	Tersedianya dukungan pelaksanaan tugas	12 bulan	40.860.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**51.523.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**51.523.500**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya jumlah SDM		**51.523.500**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya jumlah SDM		**51.523.500**	
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**271.027.280**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**271.027.280**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	87 buah	6.958.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	87 buah	6.958.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 item	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 item	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 item	20.207.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 item	20.207.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan logistik kantor	7 item	79.815.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan logistik kantor	7 item	79.815.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	44.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	44.999.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-ungang	12 bulan	3.996.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-ungang	12 bulan	3.996.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	45 kali	65.051.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	45 kali	65.051.280	
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**454.945.580**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**454.945.580**	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terbangunnya bangunan ruang pelayanan MPP Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor	1 paket 1 paket	225.000.000 229.945.580	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terbangunnya bangunan ruang pelayanan MPP Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor	1 paket 1 paket	225.000.000 229.945.580	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**716.570.014**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**716.570.014**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jenis pelayanan umum kantor	159 buah 12 bulan 12 bulan	5.000.000,00 300.336.814 411.233.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jenis pelayanan umum kantor	159 buah 12 bulan 12 bulan	5.000.000,00 300.336.814 411.233.200	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**238.606.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**238.606.600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	21 kendaraan 1 paket 6 jenis	177.925.000 28.181.600 32.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	21 kendaraan 1 paket 6 jenis	177.925.000 28.181.600 32.500.000	
II	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi**				**75.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi**				**75.000.000**	

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	1 draf	75.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	1 draf	75.000.000	
III	Program Promosi Penanaman Modal										
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi		60.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			60.000.000	
IV	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**894.618.250**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**894.618.250**	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terlaksananya pelayanan terpadi perizinan dan non perizinan	2850 izin	677.800.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terlaksananya pelayanan terpadi perizinan dan non perizinan	2850 izin	677.800.000	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	8 kegiatan	150.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	8 kegiatan	150.000.000	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	1 paket	66.818.250	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	1 paket	66.818.250	
V	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				431.600.000	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				431.600.000	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaksanaan pemantauan Penanaman modal	84 kali	246.705.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaksanaan pemantauan Penanaman modal	84 kali	227.262.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan penanaman modal	156 kali	184.895.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan penanaman modal	156 kali	188.932.000	
VI	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**89.746.400**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**89.746.400**	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sistem Informasi penanaman modal	12 bulan	89.746.400	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sistem Informasi penanaman modal	12 bulan	89.746.400	
	Total Anggaran TA. 2023				**5.939.473.171**	**Total Anggaran TA. 2024**				**5.939.473.171**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu, tidak menampung secara langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, tetapi dalam perumusan program lebih didasarkan pada tuntutan kebijakan/regulasi diatasnya disamping juga memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan. Usulan program disampaikan melalui mekanisme musrenbang pada forum SKPD dan musrenbang Kabupaten.

Tabel 5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pada prinsipnya setelah diadakan Forum Group Discussion melaui Forum SKPD oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang, stakeholder terkait termasuk elemen masyarakat yang diundang menunjukan respon yang positif atas kegiatan, sehingga seluruh kegiatan didukung oleh seluruh komponen stakeholder. Namun demikian tuntutan peningkatan pelayanan dan optimalisasi perizinan online dan realisasi investasi menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan dan diberikan alokasi anggaran di tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini semakin ketat, oleh karenanya kebijakan yang menanggani urusan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Kebijakan Nasional terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal bahwa arah kebijakan nasional penanaman modal terdiri:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi :

1) Penguatan kelembagaan penanaman modal Pusat dan Daerah, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan Pelimpahan dan Pendelegasian Wewenang Di Bidang Penanaman Modal, Pembangunan PTSP di Bidang Penanaman Modal, Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dan Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga/Instansi di Pusat dan Daerah.
2) Penentuan Bidang Usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.
3) Persaingan usaha

   Perlunya menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
4) Hubungan Industrial.

   Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Indonesia, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk

memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja serta diperlukan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

2. Persebaran Penanaman Modal;

Kondisi saat ini, bahwa adanya kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa hanya lokasi tertentu khususnya di Pulau Jawa, sehingga persebaran penanaman modal di wilayah Indonesia tidak optimal. Oleh karenanya diperlukan adanya kebijakan persebaran penanaman modal, yang diarahkan pada pengembangan pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa, percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa, pengembangan koridor ekonomi Indonesia, pengembangan sumber energy yang bersumber dari energy baru dan terbarukan yang masih melimpah di luar Pulau Jawa sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia.

3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy;

a. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan sbb :
   1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar diarahkan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
   2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur.
   3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industry agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
   4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
   5) Pengembangan sector strategis pendukung ketahanan pangan nasional antara lain sector pupuk dan benih.

b. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur sbb :
   1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
   2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
   3) Pengintregasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
   4) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
   5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.
   6) Pengembangan sector strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industry baja dan semen.

c. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Energy sbb :
   1) Optimalisasi potensi dan sumber energy baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhii kebutuhan listrik di dalam negeri.
   2) Peningkatan pangsa swasembada energy baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energy.
   3) Pengurangan energy fosil untuk alat transportasi, listrik dan industry dengan substitusi menggunakan energy baru dan terbarukan.
   4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modall serta dukungan akses pembiayaan domestic dan infrastruktur energy, khususnya bagi sumber energy baru san terbarukan.
   5) Pengembangan sector strategis pendukung sector energy antara lain industry alat transportasi, industry mesin dan industry pipa.

4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;

Kegiatan penanaman modal, sering kali menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, oleh karena itu kebijakan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau *(green economy)* yang selaras dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan :

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sector kehutanan, transportasi, industry, energy dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati,
b. Pengembangan sector prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan.
c. Pengembangan ekonomi hijau
d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modall kepada penanam modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan pengurangan pencemaran lingkungan.
e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir.
f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan / atau insentif penanaman modal;

Pemberian fasilitas, kemudahan dan / atau insentif merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing, yang bertujuan untuk mendorong minat investor untuk berinvestasi dan mendorong agar perusahaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

6. Promosi penanaman modal.

Promosi penanaman modal sangat diperlukan, untuk memberikan informasi kepada penanam modal tentang potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :

a. Penguatan image building sebagai Negara tujuan penanaman modal.
b. Pengembangan strategi promosi yang lebih focus.
c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan lembaga terkait di pusat dan daerah.
e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif menjadi realisasi penanaman modal.

Memperhatikan hal tersebut diatas, tampak bahwa arah kebijakan penanaman modal mencakup lintas sektoral, sehingga untuk melaksanakannya

tidak hanya menjadi tanggungjawab instansi penanaman modal saja, tetapii diperlukan keterlibatan dari berbagai elemen/instansi. Oleh karenanya program kegiatan pada masing-masing OPD yang terkait, juga harus memperhatikan hal tersebut diatas.

Adapun terkait kebijakan yang dilaksanakan sesuai tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara teknis diatur dalam berbagai regulasi seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota. Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal yang bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

   Sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa untuk menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal harus didukung dengan :

   a. Ketersediaan SDM yang profesional dan memiliki kompetensi handal.
   b. Ketersediaan tempat, sarana prasarana kerja dan media informasi;
   c. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses penanam modal.
   d. Layanan pengaduan (help desk) penanaman modal, dan
3. Peraturan Kapala BKPM Republik Indonesia sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Dengan terwujudnya pelayanan prima untuk mendorong investasi dan daya saing Kebupaten Batang, untuk mewujudkan visi diatas maka perlu dilakukan melalui visi yang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan tenaga bagi masyarakat pencari kerja.

3. Menciptakan kondusifitas hubungan industrial, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan iklim investasi daerah.
4. Mendorong kepemimpinan dan penempatan transmigrasi serta meningkatkan kerjasma antar wilayah dalam rangka pengembangan transmigrasi.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan penanaman modal di tingkat pusat yaitu antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja nasional dan meningkatkan daya saing dunia usaha. DPMPTSP Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan dan diharapakan dengan adanya peningkatan pelayanan akan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Batang yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran renja DPMPTSP Kabupaten Batang disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelum yaitu :

1) Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan kurang optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum, insentif investasi, kondisi infrastruktur , kebijakan/regulasi yang pro investasi.
2) Minimnya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang, dikarenakan belum optimalnya promosi investasi
3) Belum optimalnya promosi investasi dikarenakan minimnya data potensi /peluang investasi yang up to date dan keterbatasan anggaran promosi.
4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait dalam melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal
5) Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang perijinan dan investasi, dikarenakan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, minimnya informasi bidang penanaman modal serta terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan.
6) Pelayanan perijinan dan investasi belum sepenuhnya dilakukan satu pintu, sehingga dapat memperlambat proses pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan isu tersebut, maka tujuan DPMPTSP Kabupaten Batang adalah :

1) Menumbuhkan minat investasi di Kabupaten Batang
2) Meningkatkan realisasi investasi dan mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan ijin usaha.

3) Memberikan informasi tentang potensi/peluang investasi di Kabupaten Batang, untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.
2) Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha
3) Terinformasikannya Data Potensi/Peluang Investasi Kabupaten Batang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu meningkatkan realisasi Investasi Penanaman Modal dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2025 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pendukung pelaksanaan tugas
Target Capaian kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 12.011.000,-

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja	:	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
Target Capaian kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 2.960.792.680,-

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja	:	Biaya pendukung pelaksanaan tugas
Target Capaian kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 28.200.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a)

Indikator Kinerja	:	Meningkatnya SDM
Target Capaian	:	100 %
Kebutuhan Dana	:	25.000.000,-

3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja	:	Terwujudnya penerangan bangunan kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 6.000.000,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 43.000.000,-

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan rumah tangga
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 20.207.000,-

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya kegiatan rapat
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 75.815.000,-

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja	:	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 44.999.800,-

f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	:	Tersedianya informasi bagi pegawai
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 3.996.000,-

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke luar daerah
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 75.936.000,-

4. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan liannya

Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan gedung kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 100.220.300,-

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan gedung kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 63.220.300,-

5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja	:	Tersedianya jasa surat menyurat

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 316.625.211,-

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 365.357.200,-

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 177.955.000,-

b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Terpeliharanya gedung bangunan

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 35.181.600,-

c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 25.500.000,-

7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Terlaksananya percepatan dibidang penanaman modal

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 100.000.000,-

b) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Terhitungnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Batang

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 50.000.000,-

8. **Program Promosi Penanaman Modal**

a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Terhitungnya jumlah Pameran yang dilaksanakan

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 82.800.000,-

9. Program Pelayanan Penanaman Modal

a) Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja : Terlaksananya pelayanan terpadu perizinan

Target Capaian Kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 348.750.109,-

b) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Indikator Kinerja	:	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmennya
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 76.784.700,-

c) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Indikator Kinerja	:	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 90.758.200,-

10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya temu usaha lintas stakeholder
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp.65.688.000,-

b) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Indikator Kinerja	:	Tersusunnya informasi data perusahaan
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 269.357.000,-

c) Pengawasan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	:	Tersusunnya informasi data perusahaan

Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 72.702.000,-

11. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja	:	Tersedianya sistem informasi penanaman modal
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp.89.746.400,-

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 ini memegang peranan yang sangat penting sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka dengan ditetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Angaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2025.
2. Dengan ditetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (Stakeholder) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang terkait untuk menjadikan sebagai acuan dan arahan opearsionalisasi peran masng-masing dalam pelaksanaan program dan rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Dan akhirnya kita semua berharap agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Batang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Batang, 30 Agustus 2024

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Sekretaris,

MARGO SANTOSA, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19770312 199803 1 002

.